

RESTRUKTURISASI KEKUASAAN PEMERINTAHAN DESA

(Studi Dinamika Perubahan Politik
di Desa Setonorejo Kec. Kras Kab. Kediri)

SKRIPSI



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

OLEH :

LAILY PURNAWATI
NIM : 070016289

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GENAP 2003 / 2004

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

RESTRUKTURISASI KEKUASAAN PEMERINTAHAN DESA

(Studi Dinamika Perubahan Politik

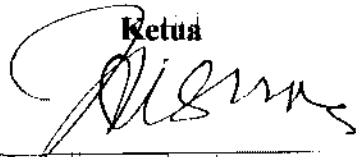
Di Desa Setonorejo Kec. Kras Kab. Kediri)

Telah dipertahankan di depan komisi penguji.

Pada hari Senin , 24 Juni 2004 , Pukul 09.00

Komisi Penguji ,

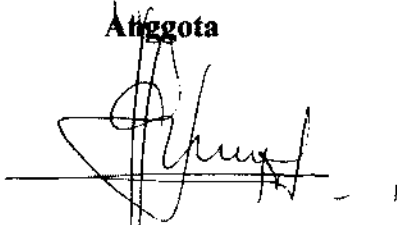
Ketua



Drs. Wisnu Pranutanto

NIP. 131 453 124

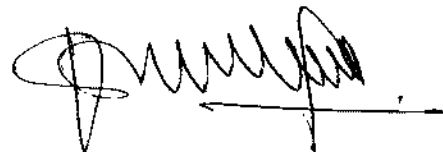
Anggota



Dra. Dwi Windyastuti, MA

NIP. 131 801 643

Anggota



Drs. Budi Prasetyo

NIP. 131 918 696

ABSTRAK

Penerapan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 telah membawa berbagai perubahan termasuk tata pemerintahan di tingkat desa. Undang – undang ini memberikan warna baru bagi tata pemerintahan dengan memberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan asal usul dan aspirasi masyarakat daerah setempat dengan azas desentralisasi.

Perubahan yang terjadi seiring penerapan UU tersebut adalah adanya restrukturisasi pemerintahan desa yang ditandai dengan adanya pembentukan lembaga legislatif desa yaitu BPD sebagai lembaga pengganti LMD. Pemilihan Kades dan Kaur umum dan keuangan dengan sistem baru merupakan salah satu bentuk perubahan yang terjadi. Disamping itu, perubahan karena penerapan UU ini diharapkan juga berdampak pada demokratisasi desa dan kemandirian desa dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan adanya mekanisme *checks and balances* dari masyarakat desa.

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dinamika perubahan politik yang terjadi di desa Setonorejo terutama di sisi restrukturisasi kekuasaan Pemerintah Desa dan perubahan apa saja yang diakibatkan oleh penerapan UU tersebut baik dari sisi struktur kekuasaan pemerintahan Desa maupun dari sisi demokratisasi masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan di desa Setonorejo dengan menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin menggambarkan perubahan dinamika politik masyarakat desa secara mendalam.

Restrukturisasi di tingkat kelembagaan Pemerintah Desa juga membawa perubahan di tingkat non struktural terutama garis kewenangan pemerintah desa yang disebabkan pembentukan BPD sebagai mitra Pemerintah Desa yang berkedudukan sejajar. Restrukturisasi ini dilakukan dengan tujuan utama memperbaiki kinerja Pemerintah desa sehingga bisa lebih efektif dan efisien untuk membentuk suatu *good governance*.

UU ini selain membawa banyak perubahan tetapi masih belum bisa membawa perubahan dari sisi partisipasi masyarakat karena mekanisme kontrol hanya terjadi pada tataran institusi saja dan Pemerintah Desa belum banyak memberikan *public sphere* bagi masyarakat.

Kata kunci : Restrukturisasi, Kekuasaan Pemerintah Desa, Demokratisasi Desa.

